

Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon

2022

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

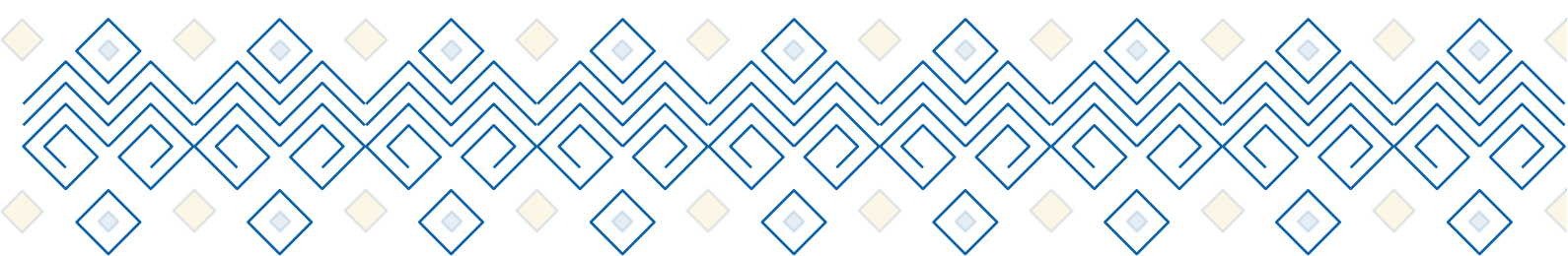
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja KPKNL Ambon disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Ambon di tahun 2022 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 263/PMK.01/2016, dan telah diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Ambon memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Pelayanan Penilaian, Piutang Negara, dan Lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2022 ini kiranya masih terdapat banyak kekurangan, ke depannya akan kami lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Demikian Laporan Kinerja KPKNL Ambon tahun 2022 ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran yang dibebankan kepada KPKNL Ambon pada tahun anggaran 2022.

Ambon, 10 Februari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Iwan Victor Leonardo



Daftar Isi

Kata Pengantar

Kata Pengantar	ii
----------------	----

Pendahuluan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
Sumber Daya Manusia	4
Sarana dan Prasarana	6
Peran Strategis	7
Permasalahan	8
Upaya Pemecahan Masalah	9

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis	11
Penetapan Kinerja Tahun 2022	15
Pengukuran Kinerja	17



Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi 2022	19
Realisasi Anggaran	24



Penutup

Penutup	29
---------	-----------



BAB I | Pendahuluan



- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Peran Strategis
- E. Permasalahan
- F. Upaya Pemecahan Masalah

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon di bawah Lingkup Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku merupakan unit instansi vertikal DJKN terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III (kepala kantor), jabatan eselon IV dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri sebagai berikut.

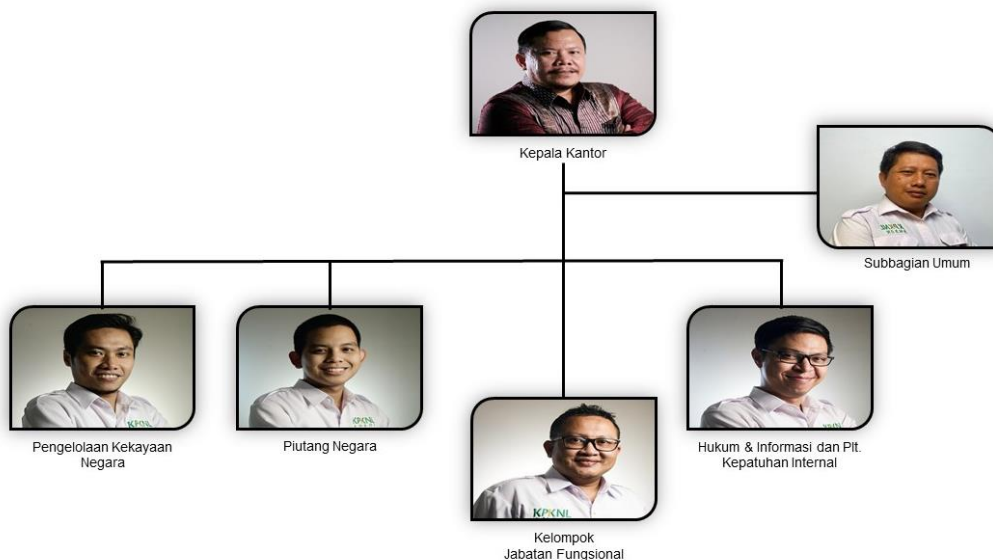
1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
3. Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyediaan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon saat ini dapat dilihat pada Bagan I.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon



Penjelasan struktur organisasi KPKNL Ambon :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub Bagian Umum (Kasubbag. Umum), dengan 5 (lima) pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran;
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (Kasi PKN), dengan 3 (tiga) orang pelaksana;
4. Kepala Seksi Piutang Negara (Kasi PN), dengan 2 (dua) orang pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Informasi (Kasi HI), dengan 2 (dua) orang pelaksana termasuk 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan;

6. Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal (Kasi KI), dengan 1 (satu) orang pelaksana; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPKNL Ambon berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon, memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Prov. Maluku yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 9 (sembilan) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Ambon
2. Kota Tual
3. Kabupaten Maluku Barat Daya
4. Kabupaten Kepulauan Tanimbar (dh. Kabupaten Maluku Tenggara Barat)
5. Kabupaten Kepulauan Aru
6. Kabupaten Maluku Tenggara
7. Kabupaten Maluku Tengah
8. Kabupaten Seram Bagian Barat
9. Kabupaten Seram Bagian Timur
10. Kabupaten Buru Selatan
11. Kabupaten Buru Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL Ambon menyelenggarakan fungsisebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas ,penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia sebagai unsur yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPKNL Ambon per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Ambon dapat dijelaskan pada tabel-tabel sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Total orang
1	I	-	-	-
2	II	3	0	3
3	III	17	2	19
4	IV	1	-	1

2. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Jml	Eselon			
		Peg	II	III	IV	Pelaksana
1	Kepala Kantor	1	-	-	1	-
2	Subbagian Umum	6	-	1	-	5
3	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	4	-	1	-	3
4	Seksi Piutang Negara	3	-	1	-	2
5	Seksi Hukum dan Informasi	3	-	1	-	2
6	Seksi Kepatuhan Internal	1	-	-	-	1
7	Kelompok Jabatan Fungsional	5	1	4	-	-
Total		23	1	4	5	13

3. Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jml	Golongan			
		Peg	I	II	III	IV
1	SLTA	2	0	0	3	0
2	D I	2	0	1	0	0
3	D III	2	0	2	0	0
4	D IV / S1	12	0	0	12	0
5	S2	4	0	0	4	0
6	S3	1	0	0	0	1
Total		23	0	3	19	1

4. Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pelelang/Pejabat Lelang	3
2	Penilai Kekayaan Negara	1
3	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
Total		5

C. SARANA DAN PRASARANA

KPKNL Ambon berlokasi di Jalan Raya Pattimura No. 18 (Gedung Keuangan Negara Lt. IV), Ambon. Ruang kerja yang digunakan oleh KPKNL Ambon adalah salah satu ruang Gedung Keuangan Negara Ambon di Lantai 4 yang digunakan sejak tahun 1995 dengan luas ruang kantor 1.572 m² dengan pembagian ruang kerja sebagai berikut : Ruang Area Pelayanan Terpadu (APT) yang dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu, ruang Kepala KPKNL, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Piutang Negara, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Penilaian, ruang Kepala dan Pelaksana Sub Bagian Umum, ruang Bendahara Pengeluaran, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, ruang Kepala Seksi dan Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, ruang Gudang ATK, ruang Rapat, ruang Sekretariat, ruang Server, ruang BKPN, ruang Minut Risalah Lelang dan kamar mandi/toilet Ruang Pertemuan (Aula), ruang Konsultasi, ruang Laktasi (menyusui), ruang Bendahara Penerimaan, ruang Arsip dan ruang dapur (*Pantry*) serta kamar mandi/toilet;

Disamping itu, KPKNL Ambon memiliki sarana dan prasarana penunjang guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi berupa :

1. Kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 (satu) unit ;
2. Kendaraan operasional sebanyak 2 (dua) unit roda empat dan 4 (empat) unit sepeda motor;
3. Komputer (PC) sebanyak 27 unit, laptop 14 unit, Note Book 1 unit dan printer sebanyak 30 unit, at DJKN);

4. Rumah dinas untuk para pejabat sebanyak 8 (delapan) unit yang berdiri diatas dua bidang tanah KPKNL Ambon, yang berstatus Hak Pakai. Rumah dinas tersebut terdiri dari : 1 (satu) unit Rumah Dinas Kepala kantor ukuran 70 m² dan 7 (tujuh) unit Rumah Dinas untuk kasubbag umum dan para kepala seksi dengan ukuran masing- masing 50 m².

D. PERAN STRATEGIS

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi DJKN di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang dan Pelayanan Lelang, KPKNL Ambon memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran Strategis KPKNL Ambon di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara adalah mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Ambon juga memiliki tugas melaksanakan Penilaian Aset (BMN) yang berperan strategis untuk menyediakan informasi nilai wajar sekaligus analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau HBU).

2. Memberikan pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Ambon di bidang Pengurusan Piutang Negara adalah penyelamatan keuangan Negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* (NPL) menjadaset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan melalui proses penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan unit lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Memberikan pelayanan Lelang

KPKNL Ambon berperan dalam pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Dengan keuntungan yang ditawarkan yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Diharapkan KPKNL dapat ikut berperan mendukung penyelesaian kredit macet melalui *disposal asset*.

Seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi informasi maka

metode penjualan barang melalui lelang juga turut berkembang, salah satunya implementasi penjualan lelang melalui internet (*e-auction*).

Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon senantiasa mengupayakan penggalan lelang secara terus-menerus baik lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, sehingga lelang menjadi salah satu sarana jual beli yang diminati masyarakat dan juga menjadi salah satu terobosan untuk ikut sertadalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.

4. Memberikan kontribusi pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang Negara, KPKNL Ambon memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Ambon memperoleh hasil bea lelang termasuk biad lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai PNBP.

E. PERMASALAHAN

1. Permasalahan Internal:

- a. sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional yang kurang memadai dari segi kuantitas untuk sebuah KPKNL yang mempunyai wilayah yang cukup luas se-provinsi Maluku dengan *stakeholder* yang cukup banyak;
- b. Wilayah kerja KPKNL Ambon yang cukup luas dan berupa kepulauan di Provinsi Maluku serta pulau-pulau kecil dan jauh lainnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menjangkaunya.;
- c. Potensi lelang yang ada masih belum dapat dioptimalkan, karena kurangnya minat peserta lelang untuk mengikuti penjualan barang. Hal ini merupakan dampak dari minimnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait lelang seperti penyediaan dan peningkatan fasilitas layanan pada ruang layanan, penyediaan fasilitas hotline lelang, dan membuat banner-banner informasi proses pelaksanaan lelang, sehingga memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam mengakses layanan lelang;

- d. Tidak disampaikannya data PNBP Pemanfaatan dan Cost-Having (Hibah) oleh satuan kerja berakibat pada tidak tercapainya realisasi nominal PNBP aset walaupun secara akumulasi, IKU terkait persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara dapat tercapai;
- e. sarana dan prasarana penunjang kinerja yang dirasa masih kurang, seperti rumah dinas, kendaraan operasional, PC, Laptop dll.

2. Permasalahan Eksternal:

- a. kondisi alam yang berat dan luasnya wilayah kerja KPKNL Ambon yang sebagian besar hanya bisa ditempuh dengan alat transportasi laut atau udara.
- b. rendahnya kualitas SDM dari *stakeholder* yang menjadi mitra kerja KPKNL Ambon;
- c. tingkat keamanan yang kurang kondusif di wilayah kerja KPKNL Ambon khususnya wilayah yang terdapat kelompok dan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS);
- d. adanya aturan atau regulasi lokal yang kurang mendukung tercapainya target kinerja KPKNL Ambon; dan
- e. mewabahnya pandemi *Covid-19* yang membatasi ruang gerak dari para pegawai KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

F. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Pemecahan Permasalahan Internal:

- a. telah diajukannya permohonan penambahan pegawai Fungsional ke kantor pusat DJKN serta mengirimkan pegawai KPKNL Ambon ke berbagai diklat dan sosialisasi/workshop. Selain itu untuk meningkatkan kualitas SDM di KPKNL Ambon juga sering mengadakan sendiri sosialisasi dengan mendatangkan narasumber

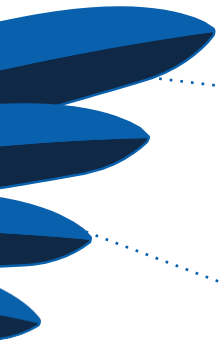
- dari luar maupun narasumber dari internal;
 - b. mengajukan permohonan penambahan pagu Anggaran pada saat penyusunan RKAKL atau melakukan penghematan anggaran; dan
 - c. mengajukan permohonan penambahan Pagu Anggaran khususnya untuk jenis belanja modal dan belanja barang.
2. Pemecahan Permasalahan Eksternal
- a. mengajukan permohonan penambahan anggaran biaya perjalanan dinas, mengadakan acara/kegiatan kedinasan yang dipusatkan di satu tempat dan memanggil/mengumpulkan *stakeholder* di satu tempat (yakni di Aula KPKNL Ambon);
 - b. mengadakan sosialisasi atau pelatihan untuk *stakeholder* serta membuka layanan konsultasi yang berkaitan dengan tupoksi KPKNL Ambon melalui luring maupun daring;
 - c. lebih selektif dalam mengadakan kegiatan/acara atau perjalanan dinas, dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk tugas-tugas yang mengandung resiko kerawanan tinggi;
 - d. meningkatkan kemampuan para pegawai KPKNL Ambon khususnya yang pendatang (bukan Orang Asli Maluku/Ambon), untuk memahami/menyelami berbagai macam kearifan lokal yang ada di wilayah Maluku; dan
 - e. tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengoptimalkan sarana digital dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut.

BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2022
- C. Pengukuran Kinerja

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : KEP-245/KN/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2022-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DJKN berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi DJKN, yaitu **"Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan serta untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat"**. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **akuntabel** artinya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

1. Misi

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi yaitu:

- a. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- b. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
- c. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
- d. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
- e. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif, sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif sertamemberi manfaat finansial dan sosial;
- b. pelayanan Lelang yang modern dan terpercaya;
- c. pelayanan Penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
- d. birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

3. Sasaran

- a. mempercepat penyelesaian kasus Piutang Negara dan pencapaiantarget IKU;
- b. tercapainya mekanisme pengelolaan barang jaminan yang efektif, efisien dan terpercaya;
- c. meningkatkan kualitas Pelayanan Lelang;
- d. meningkatkan pengelolaan data dan meminimalisasi perkara hukum;
- e. melakukan Inventarisasi Kekayaan Negara secara menyeluruh, untukmeningkatkan manfaat dari kekayaan negara serta utilisasi kekayaan negara secara umum;

- f. melaksanakan Penilaian Kekayaan Negara sehingga diketahui nilai riil kekayaan negara; dan
- g. meningkatkan dukungan teknis dan administrasi KPKNL Ambon.

4. Kebijakan dan Program Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya melalui kebijaksanaan dan program.

a. Kebijakan

Kebijakan Pengurusan Piutang, Lelang, Kekayaan Negara dan Penilaian Kekayaan Negara telah ditetapkan meliputi:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan pengurusan Piutang Negara
- 2) peningkatan pengelolaan barang jaminan
- 3) peningkatan kualitas Pelayanan Lelang
- 4) peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan pengurusan Piutang Negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara
- 5) optimalisasi Barang milik Negara
- 6) penilaian Kekayaan Negara
- 7) peningkatan pemberian dukungan teknis dan administratif KPKNL Ambon; dan
- 8) melaksanakan cara kerja *New Normal* dalam melaksanakan tugas(rapat daring, WFO, WFH, dan WFHB).

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijaksanaan yang dijalankan oleh KPKNL Ambon diuraikan dalam program sebagai berikut :

- 1) percepatan pelayanan Pengurusan Piutang Negara;
- 2) pengaman barang jaminan;

- 3) percepatan pelayanan Lelang;
- 4) mengoptimalkan sistem administrasi data Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang, dan Lelang;
- 5) mengoptimalkan upaya penyelesaian Perkara;
- 6) pelayanan di Bidang Umum yang meliputi: Kepegawaian, Keuangan, dan TURT;
- 7) tertib administrasi BMN;
- 8) optimalisasi utilisasi kekayaan negara; dan
- 9) Penilaian BMN.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Ambon harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis KPKNL Ambon. Sasaran Strategis KPKNL Ambon Tahun 2022 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Ambon tersebut di atas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100
		Persentase Produktivitas Lelang	36	100
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100
		Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100	100
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4.5	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	
			Kuantitas/Output	Kualitas/Mutu
4	Pengelolaan Kekayaan Negeradan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65	100
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100	100
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100	100
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100	100
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil Penilaian	19	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional Auction</i>	92	100
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	100
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92	100
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan Kekayaan Negara	85	100
9	SDM yang Kompeten	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100	100
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	75	100
		Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	100
		Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	100
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5	100
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian indikator kinerja DJKN Tahun 2019, DJKN berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding denganyang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannyaditetapkan sebagai berikut:
 - a) Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b) Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dikonversi menjadi 120%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian targetindikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*. IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi/Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

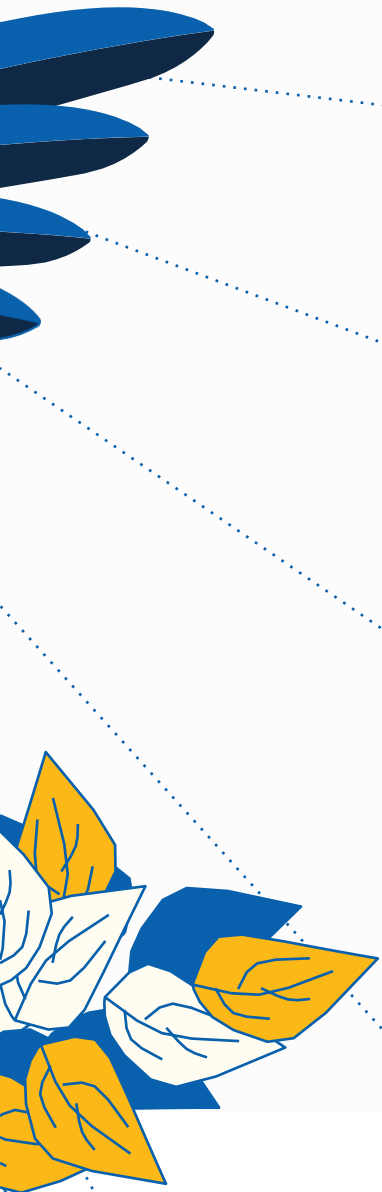
IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja



- A. Capaian Kinerja Organisasi 2022
- B. Realisasi Anggaran

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2022

No.	Nama IKU	NKO	WARNA	Penanggung Jawab
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	114,72%	hijau	PKN
2	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipkatkan	120,00%	hijau	PKN
3	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	120,00%	hijau	PKN
4	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	113,36%	hijau	PKN
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	120,00%	hijau	PN
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120,00%	hijau	PN
7	Persentase Produktivitas Lelang	120,00%	hijau	JF Lelang
8	Persentase Realisasi Pokok Lelang	120,00%	hijau	JF Lelang
9	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	108,70%	hijau	JF Lelang
10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	120,00%	hijau	JF Penilai
11	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	101,25%	hijau	JF Pranata APBN
12	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	119,00%	hijau	Subbag Umum
13	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	117,98%	hijau	KI
14	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	110,06%	hijau	KI
15	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	120,00%	hijau	Seluruh Pegawai&PPNPN KPKNL Ambon
16	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120,00%	hijau	Seluruh Pegawai KPKNL Ambon
17	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	108,89%	hijau	PKN, PN, JF Lelang dan JF Penilai
18	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	110,25%	hijau	PKN, PN dan JF Lelang
19	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	120,00%	hijau	PKN, PN dan JF Lelang
20	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	120,00%	hijau	HI dan Subbag Umum
Total		115,12%	hijau	

Dari hasil pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPKNL Ambon tahun 2022 sebagaimana diatas, maka untuk evaluasi dan analisis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

SS 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang TerhadapPerekonomian

1. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara danLelang 147,08%
2. Persentase produktivitas lelang 70,60%

Realisasi penerimaan negara dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2022 sebesar Rp11.097.586.654,08 atau sebesar 147,08% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 7.545.454.906,00.

SS 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Penqguna Jasa

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang 234,56%
2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 193,77%

Realisasi Persentase Realisasi Pokok Lelang sebesar 234,56% atau sebesar Rp211.103.492.478,00, dari Target sebesar Rp 90.000.000.000,00 tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan penggalian potensi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kelebihan lelang.

SS 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL 4.9

Realisasi indeks kepuasan pelanggan layanan KPKNL pada tahun 2022 sebesar 4.9 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4.5. Hasil ini diperoleh berdasarkan hasil survei internal yang telah

dilakukan dan penyebarankuesioner terhadap *stakeholder*, dimana hasilnya menunjukkan tren positif

dengan meningkatnya tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap pelayanan yang dilakukan KPKNL Ambon

SS 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 75%
2. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 152,56%
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)133%
4. Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 122,08%

Tahun 2022 IKU dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal semuanya mencapai target bahkan melampaui target, hal ini disebabkan realisasi:

- a. pemahaman yang baik oleh satker tentang pentingnya pengelolaan BMN secara tertib khususnya terhadap BMN berupa tanah;
- b. terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPKNL Ambon, Kanwil BPN Maluku serta Satker-satker dalam hal kerjasama pengelolaan BMN secara tertib;
- c. segala permasalahan dapat dimitigasi dengan baik oleh KPKNL Ambon

SS 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

1. Deviasi ketergunaan hasil penilaian 0.00%.

Tahun 2022 IKU dari Deviasi ketergunaan hasil penilaian mendapatkan capaian 0,00% dari target sebesar 19%.

SS 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

1. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction100.00%;
2. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN 0%.

Pada tahun 2022 realisasi dari persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional

auction 100.00% dari target 92% dan realisasi deviasi data PNBPFungsional DJKN sebesar 0% dari target 10%

SS 7: Edukasi yang Efektif

1. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 98,12

Pada tahun 2022 realisasi dari tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 98,12 dari target yang ditetapkan sebesar 89.

SS 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 96,36%
2. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2022 realisasi dari persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2022 terealisasi 96,36% dari target 85%.

SS 9: SDM yang Kompeten

1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai 120.00%.

Realisasi dari persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target sebesar 100%, hal ini terjadi karena pengelolaan kinerja pada KPKNL Ambon berbasis BSC. Capaian ini menunjukkan perhatian yang tinggi dari Kepala KPKNL Ambon terhadap kebutuhan pegawai yang mempunyai kemampuan dan keahlian tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, dibuktikan dengan banyaknya dan seringnya pegawai ditugaskan untuk mengikuti berbagai diklat dan sosialisasi.

SS 10: Organisasi yang Fit For Purpose

1. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM 92,88%;
2. Nilai review pengelolaan kinerja 94,38%
3. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 99,05%

Realisasi dari Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM di tahun 2022 tercapai sebesar 92.88 dari target 75. Keberhasilan ini merupakan wujud KPKNL Ambon untuk membangun Zona Integritas serta memberikan pelayanan yang terbaik dan bebas korupsi kepada *stakeholder*.

SS 11: Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 96,69%
2. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 119,00%

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,69% dari target 95.5%.

Capaian yang diraih oleh KPKNL Ambon dalam waktu 4 tahun terakhir mengalami naik turun. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor umum yaitu:

1. adanya pandemi Covid-19 membuat capaian pada 2020 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami perbaikan seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kerja keras KPKNL Ambon dan para *stakeholder*, dan
2. Indikator Kinerja Utama yang setiap tahun selalu mengalami pembaruan dan lebih menantang sehingga memerlukan waktu adaptasi dalam proses pencapaiannya.

Meskipun dengan berbagai hambatan dalam mencapai target kinerja, seluruh jajaran KPKNL Ambon memberikan kinerja terbaik sehingga mendapatkan capaian yang maksimal.

Guna menunjang kinerja KPKNL Ambon, berbagai inovasi layanan juga disusun agar memberikan kemudahan menjangkau *stakeholder*. Adapun beberapa inovasi layanan yaitu:

1. Aplikasi PN (SEMANGAT);
2. Aplikasi Monitoring Penilaian;
3. *Whatsapp Information Center*;
4. *Dashboard* Layanan Katong;
5. Layanan Klinik Pengelolaan BMN;
6. Percepatan SOP; dan
7. *Dashboard* yang memberikan data capaian kinerja.

Selain itu, pada tahun 2022 KPKNL Ambon juga memperoleh predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Hal tersebut tercapai karena kinerja dan komitmen seluruh jajaran KPKNL Ambon untuk memberikan pelayanan kepada *stakeholder* dengan berlandaskan integritas. Selanjutnya, tentu saja KPKNL Ambon akan berusaha mempertahankan predikat ZI-WBK dan mempersiapkan diri untuk pembangunan ZI-WBBM.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran KPKNL Ambon di tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.177.241.244,- atau 90.72% dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 1.297.696.000,-. Pada tahun 2023 KPKNL Ambon mendapat alokasi pagu DIPA sebesar Rp 2.245.199.000,- yang terdiri dari belanja barang Rp 1.528.044.000,- belanja modal Rp 717.155.000,-.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja kegiatan yang ada dibiayai dari DIPA Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Capaian Keluaran Dan Capaian Komponen

Keluaran / Komponen	Target	Satuan	Capaian Rincian Output (RWRO)			
			s.d. Triwulan I	s.d. Triwulan II	s.d. Triwulan III	s.d. Triwulan IV
1 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	70,00%	Orang	0,00%	40,00%	65,00%	115,00%
2 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	15,00%	Orang	0,00%	27,00%	27,00%	20,00%
3 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	50,00%	Persetujuan/Pend	25,00%	115,00%	150,00%	385,00%
4 Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	20,00%	BKPN	2,00%	7,00%	16,00%	29,00%
5 Risalah Lelang	100,00%	Risalah Lelang	70,00%	138,00%	155,00%	211,00%
6 Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	9,00%	Risalah Lelang	8,00%	17,00%	17,00%	12,00%
7 Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	215,00%	Rekomendasi	0,00%	12,00%	137,00%	325,00%
8 Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	50,00%	Rekomendasi	20,00%	120,00%	150,00%	358,00%
9 Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN de	884,00%	Rekomendasi	57,00%	246,00%	1372,00%	886,00%
10 Rekomendasi Kekayaan Negara	1,00%	Rekomendasi	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%
11 Rekomendasi Hasil Penilaian	1,00%	Rekomendasi	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%
12 Penggalian Potensi Lelang	0,00%	Rekomendasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13 Aset BUN yang Dikelola	0,00%	Aset	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14 Layanan Bantuan Hukum	5,00%	Perkara	1,00%	4,00%	4,00%	6,00%
15 Kerumah-tanggaan	12,00%	Layanan	3,00%	3,00%	9,00%	12,00%
16 Layanan Perkantoran	12,00%	Layanan	3,00%	3,00%	9,00%	12,00%
17 Peralatan Fasilitas Perkantoran	0,00%	Unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18 Kendaraan Bermotor	0,00%	Unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 Gedung/Bangunan	0,00%	m2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20 Pembinaan/Edukasi Publik	0,00%	Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21 Kehumasan	2,00%	Kegiatan	2,00%	3,00%	6,00%	12,00%
22 Pameran/Eksibisi	0,00%	Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
23 Rekomendasi Kepatuhan Internal	5,00%	Rekomendasi	2,00%	5,00%	7,00%	7,00%

2. Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sesuai PMK Nomor 22/PMK.02/2021

a. Data Bobot dan Capaian IKPA

Indikator IKPA	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA	Bobot Indikator	Nilai IKPA	Nilai Akhir IKPA
Revisi DIPA	0%	100,00%	0,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%
Hal III DIPA	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%
Penyerapan Anggaran	0%	100,00%	0,00%	20%	100,00%	20,00%	20%	100,00%	20,00%	20%	100,00%	20,00%
Belanja Kontraktual	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Penyelesaian Tagihan	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%
Pengelolaan UP dan TUP	10%	100,00%	10,00%	10%	100,00%	10,00%	10%	99,70%	9,97%	10%	99,75%	9,98%
Dispensasi SPM	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%	5%	100,00%	5,00%
Capaian Output	25%	85,42%	21,36%	25%	95,53%	23,88%	25%	100,00%	25,00%	25%	100,00%	25,00%
Total	50%		46%	80%		79%	80%		80%	80%		80%
Total Nilai Akhir IKPA		92,71%			98,60%			99,96%			99,97%	

b. Nilai SMART DJA

Capaian SMART DJA 31 Desember 2022	94,50%
------------------------------------	--------

3. Konsistensi Rencana Penarikan Dana

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2022
Nomor : DIPA-015.09.2.538044/2022
Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

Kementerian		:(015)	KEMENTERIAN KEUANGAN												
Unit Organisasi		:(09)	DITJEN KEKAYAAN NEGARA												
Provinsi		:(21)	MALUKU												
Kode dan Nama Satker		:(538044)	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON												
Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah)															
No.	KODE	SATKER	RENCANA PENARIKAN DANA/PERKIRAAN PENERIMAAN												JUMLAH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	538044	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON RENCANA PENARIKAN DANA	34.512	96.082	92.871	143.085	121.612	127.758	95.553	97.617	99.622	76.983	80.041	231.961	1.297.696
		52 BELANJA BARANG DAN	34.512	96.082	92.871	143.085	121.612	127.758	95.553	97.617	99.622	76.983	80.041	231.961	1.297.696
	015.09.CD.4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	0	0	0	0	0	2.770	2.162	1.609	0	768	0	3.535	10.904
		52 BELANJA BARANG DAN	0	0	0	0	0	2.770	2.162	1.609	0	768	0	3.535	10.904
	015.09.CD.4798	Pengelolaan Aset	6.564	7.755	3.205	16.960	10.438	12.668	15.538	15.016	34.510	15.307	7.307	77.403	222.673
		52 BELANJA BARANG DAN	6.564	7.755	3.205	16.960	10.438	12.668	15.538	15.016	34.510	15.307	7.307	77.403	222.673
	015.09.WA.4700	Legislasi dan Litigasi	0	214	720	240	0	1.440	480	480	0	0	0	3.323	6.897
		52 BELANJA BARANG DAN	0	214	720	240	0	1.440	480	480	0	0	0	3.323	6.897
	015.09.WA.4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	26.306	80.562	88.945	120.437	109.846	110.640	67.851	75.869	61.732	60.908	72.733	129.905	1.005.734
		52 BELANJA BARANG DAN	26.306	80.562	88.945	120.437	109.846	110.640	67.851	75.869	61.732	60.908	72.733	129.905	1.005.734
	015.09.WA.4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	0	1.216	0	2.392	240	0	6.972	3.920	2.616	0	0	8.028	25.384
		52 BELANJA BARANG DAN	0	1.216	0	2.392	240	0	6.972	3.920	2.616	0	0	8.028	25.384
	015.09.WA.4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.641	6.335	0	3.056	1.088	240	2.550	664	763	0	0	9.767	26.104
		52 BELANJA BARANG DAN	1.641	6.335	0	3.056	1.088	240	2.550	664	763	0	0	9.767	26.104
		PERKIRAAN PENERIMAAN	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.093	155.166	1.861.131
		- PNBP (425762)	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	406.000
		- PNBP (425764)	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	113.333	1.360.000
		- PNBP (425765)	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.271	15.131

4. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		92,71%
1.	Revisi DIPA	0,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	0,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	21,36%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan I		92,71%

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		98,60%
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10,00%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	23,88%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan II		98,60%

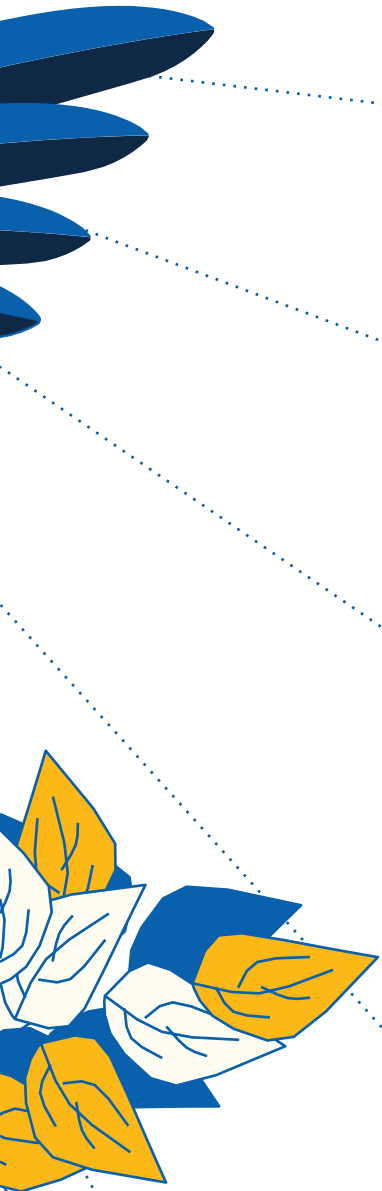
Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		99,96%
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,97%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART		0,00%
Capaian Triwulan III		99,96%

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A) Nilai IKPA		99,97%
1.	Revisi DIPA	10,00%
2.	Hal III DIPA	10,00%
3.	Penyerapan Anggaran	20,00%
4.	Belanja Kontraktual	0,00%
5.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
6.	Pengelolaan UP dan TUP	9,98%
7.	Dispensasi SPM	5,00%
8.	Capaian Output	25,00%
B) Nilai SMART		94,50%
Capaian Triwulan IV		96,69%

BAB IV | Penutup



Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Ambon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Ambon sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Ambon ditetapkan berdasarkan peta strategis Kemekeu- Three yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah disampaikan pada BAB III. rata-rata pencapaian kinerja KPKNL Ambon (NKO) tahun 2022 sebesar 115.12% yang berarti pencapaian kinerja di atas 100%. Dari 20 IKU yang ditetapkan berwarna hijau. Pencapaian NKO meningkat dari tahun 2022 demikian keberhasilan yang dicapai oleh KPKNL Ambon sudah menunjukkan bahwa telah semakin dihayati dan dilaksanakannya nilai-nilai Kementerian Keuangan oleh seluruh jajaran KPKNL Ambon dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adanya masalah/kendala dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan pada BAB I. bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak berbuat yang terbaik bagi organisasi. dengan bekerja lebih giat lagi serta terus menerus mengamalkan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik. bahkan terus berusaha untuk meningkatkannya.

**LAMPIRAN LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
TAHUN 2022**



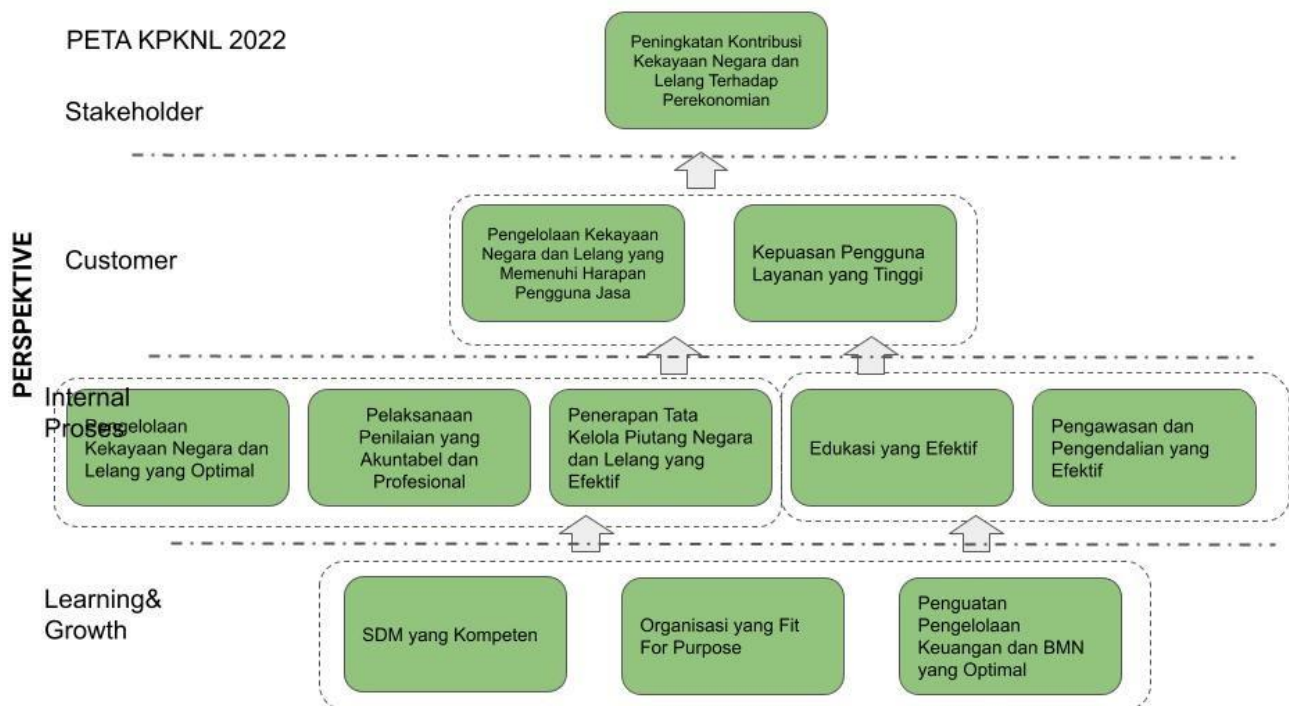
**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 7/KN.29/2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ambon, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5 (Skala 5)
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%
		4c-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E- Conventional Auction	92%
		6b-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	75
		10b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11	Penguatan pengelolaan Keuangan dan BMN ang Optimal	11a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		11b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%



Program/Kegiatan	Anggaran
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp172,793,000
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp10,904,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp.0
3. Pengelolaan Aset	Rp161,889,000
Dukungan Manajemen	Rp1,064,119,000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp6,897,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,005,734,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp25,384,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp26,104,000

Jayapura, 31 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Ambon



Iwan Victor Leonardo



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian								
	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
	2b-CP	Persentase Penurunan <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi								
	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4.5	4.5
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	65%	65%	65%
	4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional								
	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
	6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
	6b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif								
	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	-	89	89	-	89	89	89



No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i>							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	75	75
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Iwan Victor Leonardo



Sasaran Kerja Pegawai

KPKNL AMBON

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Iwan Victor Leonardo	NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	19770927 199803 1 001	NIP	19720902 199301 1 001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina/IV.a	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk. I/IV.b
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
NO	RENCANA KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1.2 Persentase Produktivitas Lelang	36%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1 Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2.2 Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.5 (skala 5)
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4.2 Persentase Bidang Tanah yang Disertifikatkan	100%
		4.3 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4.4 Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5.1 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6.1 Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6.2 Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7.1 Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8.1 Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%



9.	SDM yang Kompeten	9.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10.1	Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK	75
		10.2	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10.3	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11.1	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11.2	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

B. KINERJA TAMBAHAN

Jayapura, 31 Januari 2022

Pegawai yang dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Iwan Victor Leonardo
NIP 197709271998031001



Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP 197209021993011001



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG AMBON
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1.	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa IKU: Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	Melakukan penelusuran ulang atas berkas Piutang Negara dengan kondisi PSBDT	1. Menurunkan nilai outstanding Piutang Negara 2. Meningkatkan biaya administrasi dari Piutang Negara	Q1 s.d Q4 Tahun 2022	Seksi Piutang Negara	Rp14.446.000,00
2.	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal IKU: Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	Melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan sertipikasi BMN dengan BPN dan PJN	Percepatan penerbitan Sertipikat BMN berupa tanah sebanyak target yang di tetapkan	Q1 s.d Q4 Tahun 2022	Seksi PKN	Rp47.132.000,00
3	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal IKU: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	Melakukan focus pengambilan data dan dokumen BMN pada satu Satuan Kerja sesuai jumlah target	Penyelesaian evaluasi kinerja BMN secara efektif dan efisien	Q1 s.d Q4 Tahun 2022	Seksi PKN	Rp12.722.000,00
4	SS: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif IKU: Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberi-kan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1 s.d Q4 Tahun 2022	Seksi PKN	Rp0

Pejabat/Pegawai/PNS yang dinilai,



Iwan Victor Leonardo

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022

